

Pendekatan Multikultural Dalam Memahami Sejarah Indonesia^{*)}

Oleh :
Agus Mulyana

Sejarah Indonesia yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat pada umumnya adalah sejarah yang ditulis untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Masyarakat Indonesia pada umumnya mengenal sejarah Indonesia ketika mengikuti persekolahan baik mulai, tingkat dasar hingga menengah. Penulisan sejarah untuk kepentingan pendidikan tentu berbeda dengan penulisan sejarah hasil penelitian. Sejarah yang diajarkan di sekolah mengikuti pada kurikulum yang sudah ditetapkan. Sedangkan kurikulum merupakan produk kebijakan politik pemerintah, sudah barang tentu materi sejarah yang diajarkan bersifat selektif dan sarat dengan kepentingan pemerintah. Berbeda dengan penulisan sejarah hasil-hasil penelitian sangat tergantung pada sumber yang ditelitinya. Bisa saja hasil penelitian sejarah menghasilkan temuan baru yang berbeda dengan pendapat yang umum masyarakat. Pendapat tersebut lahir berdasarkan hasil pembelajaran di sekolah. Fenomena seperti ini bisa menimbulkan kontraversial isyu dalam penulisan sejarah. Salah satu cara untuk mengeleminir masalah tersebut yaitu dengan melihat sejarah Indonesia secara multikultural.

Masalah Sejarah Nasional

Permasalahan sejarah nasional sudah menjadi pembicaraan sejak awal Indonesia merdeka. Sejak awal kemerdekaan sudah ada semangat pemikiran bagaimana melakukan dekolonisasi terhadap historiografi Indonesia¹, karena sejarah yang ditulis pada saat itu masih dipengaruhi oleh kolonial yang masih bersifat neerlandosentris yaitu sejarah yang dilihat dari kepentingan kolonial. Materi yang disajikan dalam penulisan yang neerlandosentris yaitu peran penjajah, bangsa Indonesia hanya sebagai pelayan bangsa Belanda.² Logika penulisan sejarah yang demikian harus diubah dengan penulisan sejarah yang bersifat Indonesiasentris yaitu penulisan sejarah yang dilihat dari kepentingan bangsa Indonesia.

Keperluan terhadap penulisan sejarah yang indonesiasentris menjadi latar belakang dilaksanakannya Seminar Sejarah Nasional Indonesia I di Yogyakarta pada tanggal 14 – 18 Desember 1957. Hal yang menjadi pembicaraan hangat dan terjadi perdebatan dalam seminar ini mengenai konsepsi sejarah nasional. Perdebatan mengenai konsepsi sejarah nasional terjadi antara Moh. Yamin dan Sujatmoko. Yamin mengatakan perlu adanya filsafat sejarah nasional yang akan menjadi petunjuk bagi pengajar dan cara mengajarkan atau penulis yang menuliskan sejarah bangsa³. Sedangkan menurut Sujatmoko istilah filsafat sejarah nasional kurang tepat, sebab sejarah adalah ilmu pengetahuan yang tidak boleh mengabdikan kepada ideologi tertentu⁴.

Istilah sejarah nasional dalam penulisan sejarah Indonesia sudah muncul pada Seminar Sejarah Nasional Indonesia yang pertama. Konsepsi sejarah nasional adalah sejarah bangsa

^{*)} Disajikan pada Workshop Nasional Kesejarahan “Menggagas Paradigma Pembelajaran Sejarah Berbasis Multikultur”, diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, Bandung, 30 Oktober – 1 November 2008.

¹ Sartono Kartodirdjo, (1992), *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*, Jakarta : Gramedia, hlm 29.

² Agus Mulyana dan Darmiasti, (2009), *Historiografi Di Indonesia Dari religious Magis Hingga Strukturis*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 4.

³ Moh. Yamin, “Tjatur-Sila Chalduniah, dalam Sujatmoko, ed., (1995), *Historiografi Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta “ Gramedia 203-214.

⁴ Sujatmoko, “Merintis Hari Depan”, dalam, *ibid*, hlm. 183-201.

artinya sejarah yang dibangun atas kepentingan bangsa Indonesia. Dalam konsepsi ini yang penting adalah bagaimana melacak akar sejarah eksistensi bangsa tersebut. Lahirnya Indonesia dalam pembentukan negara bangsa (*nation state*) merupakan suatu proses sejarah yang cukup panjang. Paham kebangsaan di Indonesia lahir sebagai hasil dari proses sejarah yaitu ketika awal abad ke-20 yang ditandai dengan munculnya kaum terpelajar dan merupakan dampak dari adanya pendidikan Barat yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Mereka banyak berpikiran tentang perlunya suatu negara yang lahir atas dasar kebangsaan. Lahirnya pandangan kebangsaan di Indonesia merupakan dampak penting dari adanya kolonialisme. Dengan demikian paham kebangsaan atau nasionalisme yang lahir di Indonesia lebih didasarkan pada kesamaan sejarah. Nasionalisme yang lahir di Indonesia pada awal abad ke-20 merupakan produk kekuatan sejarah sebagaimana yang diungkapkan oleh Hans Kohn.⁵

Dekolonisasi terhadap historiografi Indonesia memerlukan adanya suatu penulisan sejarah yang bersifat standar yang dapat dijadikan rujukan dalam melihat sejarah Indonesia. Penulisan ini kemudian melahirkan adanya buku sejarah nasional sebanyak enam jilid. Jumlah enam jilid merupakan seri periodisasi dalam sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia sebagai bangsa dilacak sejak mulai zaman sejarah hingga periode kontemporer. Secara fakta historis, Indonesia sebagai Negara bangsa baru ada sejak Indonesia merdeka yakni 17 Agustus 1945. Akan tetapi kalau kita melihat uraian dari keenam jilid tersebut memberikan suatu tafsiran seolah-olah ada kesan bahwa Indonesia sebagai bangsa sudah ada sejak zaman pra sejarah. Pada hal kalau kita lihat secara faktual bahwa sebelum berdirinya Republik Indonesia terdapat kerajaan-kerajaan yang masih berkuasa secara otonomi. Kerajaan-kerajaan itu merupakan suatu kekuasaan yang berdaulat dan menyebar hampir di seluruh Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kerajaan-kerajaan itu merupakan bangsa Indonesia ?.

Kerajaan-kerajaan tersebut menyebar hampir berada di seluruh Indonesia. Bahkan ada diantara kerajaan-kerajaan tersebut yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Dalam penulisan sejarah nasional selalu diinterpretasikan bahwa perlawanan mereka masih bersifat kedaerahan belum ada persatuan. Interpretasi ini secara faktual kalau dilihat pada masa itu menimbulkan pertanyaan, apakah perlawanan yang dilakukan oleh raja-raja itu demi suatu bangsa Indonesia yang luas atau hanya untuk mempertahankan kerajaannya ? apakah mereka sudah memiliki kesadaran perlu adanya perjuangan untuk mendirikan Negara Republik ? apakah diantara kerajaan-kerajaan itu memiliki semangat kebersamaan untuk melawan penjajah ? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi suatu perdebatan dalam konsepsi sejarah nasional, karena dalam fakta sejarah bahwa bangsa Indonesia baru mengenal gagasan nasionalisme baru sekitar awal abad ke-20 dan banyak dipelopori oleh kaum terpelajar atau elite modern.⁶ Sedangkan kerajaan-kerajaan tersebut sudah lama ada jauh sebelum kedatangan kaum penjajah.

Interpretasi dalam konsepsi sejarah nasional memang sangat ideologis. Dalam model interpretasi yang demikian yang penting dicari adalah pencarian arti subjektif dari peristiwa sejarah. Masa lampau dipelajari bukan demi pengetahuan mengenai masa lampau tetapi demi lambang yang bias diadakannya untuk masa kini. Sejarah merupakan guru yang paling baik

⁵ Hans Kohn, (1985), *Nationalism : Its Meaning and History*, Florida : Krieger Publ.Coy, sebagaimana dikutip oleh Rochiati Wiriaatmadja "Paradigm Shift Dalam Kajian Teoretik Paham Nasionalisme", dalam Nana Supriatna dan Erlina Wiyantarti, (2008), *Sejarah Dalam Keragaman Penghormatan Kepada Prof. Helius Sjamsuddin, Ph.D, MA*, Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, hlm. 2.

⁶ Robet Van Niel, (1984) *Munculnya Elite Moderen di Indonesia*, terjemahan Zahara, Deliar Noer, Jakarta : Pustaka Jaya.

yang bisa mengajarkan cara menghindari kesalahan-kesalahan di masa lampau.⁷ Kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dijadikan simbol dalam memberikan interpretasi terhadap akar sejarah Indonesia.

Faktor kolonialisme sangat menentukan terhadap lahirnya negara Republik Indonesia. Wilayah Republik Indonesia sekarang merupakan bekas jajahan Belanda. Secara faktual Republik Indonesia ini sekarang ada dikarenakan adanya penjajahan. Spirit nasionalisme dalam melawan penjajah yang berbuah pada lahirnya Republik Indonesia. Bahkan kelahiran Negara Republik Indonesia telah menghilangkan kekuasaan kerajaan-kerajaan yang berdaulat pada masa sebelum Republik Indonesia ini lahir. Nasionalisme menjadi pemersatu dalam menentukan lahirnya Republik Indonesia. Sehingga konsepsi sejarah nasional adalah sejarah Negara Republik Indonesia.

Interpretasi dalam penulisan sejarah nasional selalu bersifat normatif dan ideologis. Dalam interpretasi seperti ini, sejarah tidak diinterpretasikan sebagai bagian dari realitas masa itu sendiri, tetapi sejarah penuh dengan interpretasi yang simbolis bahkan sejarah menjadi ideologi praktis bukan merupakan pengalaman masa lampau.⁸ Pendekatan interpretasi yang demikian menjadikan sejarah diinterpretasikan secara tunggal. Dalam hal ini Negara sebagai sebuah institusi memberikan interpretasi secara subjektif menurut ideology dari penguasa Negara tersebut. Ada semacam sentralisasi dalam menafsirkan dan menulis sejarah.⁹

Sentralisasi interpretasi dalam penulisan sejarah nasional berakibat pada kurang ditampilkannya dinamika sejarah yang terjadi di daerah-daerah. Peristiwa-peristiwa sejarah yang ditampilkan sangat selektif yaitu peristiwa-peristiwa yang dianggap mewakili sebagai peristiwa nasional. Misalnya perlawanan yang dilakukan oleh para tokoh atau pemimpin daerah lebih diinterpretasikan sebagai perlawanan bangsa Indonesia, bukan sebagai perlawanan tokoh daerah. Untuk menunjukkan adanya rasa persatuan dalam historiografi sejarah nasional maka dipilihlah tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai Pahlawan Nasional dan mereka adalah pahlawan bangsa Indonesia.

Multikulturalisme dan Sejarah Nasional

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat dilihat sebagai mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan yang seperti sebuah mosaik.¹⁰

Ciri utama dari multikulturalisme dalam pengertian tersebut adalah adanya kesederajatan dalam perbedaan dan perbedaan mencerminkan suatu mosaik. Dalam pandangan yang multikulturalisme tidak ada sikap menafikan peran-peran orang lain sekecil

⁷ Taufik Abdullah dan Abdurrahman Surjomihardjo, "Arah dan Perspektif Studi Sejarah Indonesia", Taufik Abdullah dan Abdurrahman, ed. (1985), *Ilmu Sejarah dan Historiografi*, Jakarta : Gramedia, hlm. 27-29.

⁸ Bambang Purwanto, "Kata Pengantar Ketika Historiografi Hanya Sebuah Topeng", dalam Katharine E. Mc Gregor, (2008), *Ketika Sejarah Berseragam Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indonesia*, Yogyakarta : Syarikat, hlm. xxi - xxiii

⁹ Henk Schulte Nordholt, "Prakata Demiliterisasi Historiografi Indonesia", dalam, Katharine E. Mc Gregor, (2008), *Ketika Sejarah Berseragam Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indonesia*, Yogyakarta : Syarikat, hlm. Xvii.

¹⁰ Parsudi Suparlan, "Manuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural", dalam Ki Supriyoko, (2005), *Pendidikan Multikultural Dan Revitalisasi Hukum Adat Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta : Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata, hlm. 24.

apapun, mereka harus dianggap sebagai bagian dari kita. Kesamaan yang dicari dalam keragaman bukan perbedaan yang dipertentangkan.

Wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang sangat luas dan seluruh wilayah Indonesia pernah dijajah oleh penjajah yang sama bahkan memiliki sejarah sebelum datangnya bangsa penjajah, misalnya zaman Hindu-Budha dan Islam yang kemudian melahirkan kerajaan-kerajaan. Pertanyaannya adalah apakah dalam historiografi sejarah nasional semua wilayah Indonesia tertulis sejarahnya ? Apakah ada dominasi pada daerah-daerah tertentu ketika ditulis sejarah pada suatu periode ? Apakah penulisan sejarah nasional tidak bersifat diskriminatif dengan menafikan daerah-daerah tertentu tidak ada perannya ?.

Secara teoretis, jika kita ingin menulis sejarah nasional dengan pendekatan yang multikultural, maka perlu adanya porsi yang sama dari masing-masing daerah ditampilkan sebagai bagian dari sejarah Indonesia. Masing-masing daerah memiliki peran yang sama dalam melahirkan Negara Republik Indonesia, karena Republik Indonesia ini bukanlah milik salah satu kelompok atau golongan atau wilayah, tetapi Republik Indonesia milik dari semua daerah atau golongan yang menjadi bagian wilayah Indonesia peninggalan Hindia Belanda. Peran daerah yang bersifat nasionalistis semestinya menjadi titik temu dari historiografi peran dalam membangun Republik Indonesia, sebagaimana dalam pandangan multikultural bahwa relasi itu amat penting dalam melihat kesederajatan.

Sejarah nasional selalu ditempatkan bagi masyarakatnya sebagai ingatan kolektif. Ingatan kolektif ini diciptakan oleh negara atau diinterpretasikan oleh penguasa tentang masa lalu sejarah bangsanya. Tujuan dari penciptaan ini adalah agar dapat terciptanya kesadaran sejarah dalam konteks berbangsa.¹¹ Penanaman ingatan kolektif tersebut dilakukan dari generasi ke generasi dan biasanya melalui jalur pendidikan di sekolah. Dalam pendekatan yang multikultural hendaknya kesadaran timbul dalam masyarakat sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang dibangun secara bersama-sama. Hal harus kita pertanyakan apakah anak yang sekolah di Jawa mengetahui dan menghargai peran masyarakat di luar Jawa dan merasa bahwa masyarakat di luar Jawa merupakan bagian dari peran sejarah ?. Hal ini dapat terjadi manakala anak yang di Jawa tersebut mengetahui sejarah dari daerah-daerah di luarnya. Begitu pula sebaliknya anak sekolah yang ada di luar Jawa harus merasakan bahwa daerahnya merupakan bagian dari bangsa Indonesia dan memiliki peran yang penting dalam pembentukan Republik Indonesia.

Pandangan multikulturalisme penting dilakukan dalam memahami sejarah Indonesia mengingat masih adanya sentimen etnis pada kelompok tertentu dalam melihat Indonesia sebagai bangsa. Masih ada tumbuh dalam kelompok tertentu yang merasa sebagai pemilik yang sah terhadap republic ini dan begitu juga sebaliknya masih ada kelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri dan merasa sebagai bukan bagian dari Republik Indonesia. Untuk membangun sikap yang demikian adalah dengan mengkonstruksi kembali sejarah nasional yang beragam dan proporsional dalam suatu mainstream kebangsaan Indonesia. Historiografi sejarah nasional adalah sebuah mosaik berbagai kelompok masyarakat Indonesia dalam pembentukan Negara Republik Indonesia.

Sejarah Lokal Suatu Alternatif

Konstruksi sejarah nasional yang multikultural bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam mengkonstruksi ini yaitu pertama memori kolektif masyarakat terhadap sejarah yang sudah mapan dengan sejarah nasional yang sentralistis dan kedua secara teknis membutuhkan suatu pekerjaan besar dalam membongkar historiografi sejarah nasional yang sudah mapan.

¹¹ Katharine E. Mc Gregor, (2008), *Ketika Sejarah Berseragam Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indonesia*, Yogyakarta : Syarikat, hlm.8-13.

Memori kolektif merupakan ingatan kolektif yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat terhadap sejarahnya. Menurut para ahli psikologi memori sebagai pengetahuan yang tersimpan dalam pikiran yang terkait erat dengan kerja otak. Memori merupakan kemampuan yang amat penting bagi manusia karena membentuk pengetahuan dasar untuk belajar. Dalam kaitan dengan sejarah memori dapat membebaskan kita dari tirani persepsi sehingga sikap dan perilaku kita dibimbing oleh pengalaman masa lalu seperti juga untuk masa sekarang.¹²

Dalam konteks sejarah, memori merupakan pikiran-pikiran yang secara eksplisit mengacu kepada peristiwa-peristiwa masa lalu dan pengalaman-pengalaman (apakah itu real atau imajinasi) karena mengingat kembali (*recalled*) pengalaman masa lampau.¹³ Masyarakat Indonesia telah mengalami beberapa peristiwa yang mengkisahkan adanya konflik horizontal yang disebabkan adanya konflik politik antar kekuatan politik yang berpengaruh. Peristiwa ini terutama terjadi di sekitar tahun 1965-an dan dijadikan sebagai peristiwa nasional walaupun konflik horizontal tersebut terjadi pada daerah. Ada dua kekuatan utama yang berkonflik pada saat itu yaitu antara kelompok pendukung PKI dan non-PKI. Peristiwa-peristiwa tersebut diingat oleh masyarakat yang pernah mengalami atau mendengar dengan interpretasinya sendiri, yang terkadang masyarakat tidak mengetahui penyebab yang sesungguhnya dari peristiwa tersebut.

Peristiwa-peristiwa sejarah nasional kemudian diinterpretasi oleh pemerintah dengan menggunakan interpretasi pemerintah dalam historiografi sejarah nasional. Sejarah yang ditulis memperlihatkan adanya narasi besar yang terfokus pada negara dan kenasionalan (*nationhood*). Historiografi sebagian besar dikendalikan oleh negara, partisipasi rakyat kurang begitu besar diletakkan pada peran-peran kesejarahannya.¹⁴ Walaupun ada peran rakyat, kehadirannya dianggap mewakili negara. Rekonstruksi ini akan melahirkan suatu interpretasi yang hegemonik.

Salah satu upaya agar menghindari interpretasi yang sentralistik yaitu dengan penulisan sejarah lokal. Dalam pendekatan yang multikulturalistik, penulisan sejarah lokal harus ditempatkan sebagai suatu historiografi yang tidak kalah pentingnya dengan historiografi sejarah nasional. Sejarah lokal harus ditempatkan sebagai suatu yang otonomi, dinamika lokalitas yang harus menjadi ukuran dalam menulis peristiwa-peristiwa lokal.

Sejarah lokal merupakan sejarah dari suatu “tempat”, suatu “locality”, yang batasannya ditentukan oleh “perjanjian” yang diajukan oleh penulis sejarah.¹⁵ Batasan yang dijadikan keruangan sejarah lokal, tidak hanya batasan administratif pemerintahan saja, seperti sejarah propinsi, sejarah kabupaten, sejarah kecamatan dan lain sebagainya. Penulis sejarah dapat menetapkan batasan keruangannya tersendiri. Hal terpenting dalam penulisan sejarah local, dapat dilihat dari berbagai aspek. Kajian sejarah local yaitu studi tentang kehidupan masyarakat atau khususnya komunitas dari suatu lingkungan sekitar (*neighborhood*) tertentu dalam dinamika perkembangannya dalam berbagai aspek kehidupan manusia¹⁶.

Penulisan sejarah lokal dalam pengertian sejarah daerah administrasi pemerintahan, pernah dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 1970-an hingga tahun 1980-an pemerintah melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah (ISDN) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek penulisan sejarah ini meliputi

¹² Mestika Zed, “Ingatan Lokal dan Keprihatinan Nasional”, dalam Agus Mulyana dan Restu Gunawan, (2007), *Sejarah Lokal Penulisan dan Pembelajaran di Sekolah*, Bandung : Salameena Press, hlm. 46.

¹³ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁴ Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari, “Memikir Ulang Historiografi Indonesia”, dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari, ed. (2008), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, Jakarta : Obor, hlm. 27.

¹⁵ Taufik Abdullah, (1990), *Sejarah Lokal di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjahmada University Press, hlm. 15.

¹⁶ I Gde Widja, (1991), *Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah*, Bandung : Angkasa, hlm. 5.

seluruh propinsi (27 propinsi). Tema penulisan sejarah merujuk kepada periodisasi sejarah nasional, jadi penulisan sejarah lokal yang merujuk pada dinamika sejarah nasional. Tema-tema tersebut yaitu “Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah” dan “Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di Daerah”. Penulisan sejarah ini bersifat ideologis, karena tujuan akhir dari penulisan ini yakni menuju pada integrasi nasional¹⁷ yakni menunjukkan kesan bahwa di seluruh propinsi Indonesia ada perjuangan melawan terhadap penjajah dan ada peristiwa revolusi kemerdekaan. Pemerintah ingin memberikan suatu “keseragaman” dinamika sejarah yang terjadi di masing-masing propinsi, sehingga ada semacam ‘pemaksaan’ penulisan. Karena belum tentu, setiap sejarah memiliki peristiwa yang sama dalam periode yang sama.

Proyek ISDN tersebut, belum menunjukkan aspek multikulturalisme dalam penulisan sejarah lokal, karena masih adanya sentralisasi penulisan sejarah dari historiografi sejarah nasional pada sejarah lokal. Pendekatan multikulturalisme semestinya dilihat dari dinamika sendiri apa yang terjadi pada lokalitas tersebut. Peristiwa yang terjadi pada lokalitas tersebut mesti ditempatkan sebagai sesuatu yang otonomi, tetapi harus dianggap sebagai bagian terpenting dalam memahami historiografi nasional. Jangan lah arus utama sejarah nasional dipaksakan pada sejarah lokal. Misalnya arus utama yang terjadi pada sejarah nasional ketika periode revolusi khususnya pada awal kemerdekaan yaitu terjadinya revolusi sosial. Pada peristiwa ini, terjadinya semacam “gerakan perlawanan rakyat” arus bawah kepada sisa-sisa kekuatan yang pro kolonial. Di beberapa daerah terjadi pembunuhan oleh rakyat terhadap para pangreh praja karena para pangreh praja ini merupakan salah satu elemen yang pro kolonial. Fenomena peristiwa sejarah nasional yang demikian itu, ternyata tidak terjadi pada seluruh daerah di Indonesia. Revolusi sosial hanya terjadi pada beberapa daerah tertentu.

Historiografi sejarah nasional yang multikultural hendaknya menempatkan sejarah lokal sebagai suatu yang penting. Periodisasi mungkin dibuat sama pada masing-masing lokal, akan tetapi peristiwa hendaknya harus dilihat pada kekhasan masing-masing. Mungkin ada peristiwa yang sama, dan ada pula peristiwa yang berbeda. Bahkan

¹⁷ Susanto Zuhdi, “Historiografi Sejarah Lokal Di Indonesia Suatu Tinjauan Umum”, dalam Agus Mulyana dan Restu Gunawan, (2007), *Sejarah Lokal Penulisan dan Pembelajaran di Sekolah*, Bandung : Salameena Press, hlm. 117.